BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografi beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92 hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl. Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten dan kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Di bawah ini merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir 2008:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Di Jawa Barat 2005-2008

Kabupaten/Kota *Regency/City*	2005	2006	2007	2008
Kab./*Reg.*				
01. Bogor	4 100 934	4 216 186	4 316 236	4 402 026
02. Sukabumi	2 224 993	2 240 901	2 258 253	2 277 020
03. Cianjur	2 098 644	2 125 023	2 149 121	2 169 984
04. Bandung	4 263 934	4 399 128	3 038 038	3 116 056
05. Garut	2 321 070	2 375 725	2 429 167	2 481 471
06. Tasikmalaya	1 693 479	1 743 324	1 792 092	1 839 682
07. Ciamis	1 542 661	1 565 121	1 586 076	1 605 891
08. Kuningan	1 096 848	1 118 776	1 140 777	1 163 159
09. Cirebon	2 107 918	2 134 656	2 162 644	2 192 492
10. Majalengka	1 191 490	1 197 994	1 204 379	1 210 811
11. Sumedang	1 067 361	1 089 889	1 112 336	1 134 288
12. Indramayu	1 760 286	1 778 396	1 795 372	1 811 764
13. Subang	1 421 973	1 441 191	1 459 077	1 476 418
14. Purwakarta	770 660	784 797	798 272	809 962
15. Karawang	1 985 574	2 031 128	2 073 356	2 112 433
16. Bekasi	1 953 380	1 991 230	2 032 008	2 076 146
17. Bandung Barat	-	-	1 493 225	1 531 072
Kota/*City*				
18. Bogor	844 778	855 846	866 034	876 292
19. Sukabumi	287 760	294 646	300 694	305 800
20. Bandung	2 315 895	2 340 624	2 364 312	2 390 120
21. Cirebon	281 089	285 363	290 450	298 995
22. Bekasi	1 994 850	2 040 258	2 084 831	2 128 384
23. Depok	1 373 860	1 393 568	1 412 772	1 430 829
24. Cimahi	493 698	506 250	518 985	532 114
25. Tasikmalaya	594 158	610 456	624 478	637 083
26. Banjar	173 576	177 118	180 744	184 577
Jawa Barat	**39 960 869**	**40 737 594**	**41 483 729**	**42 194 869**

(Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat 2008)

Di bawah ini merupakan tabel jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten atau Kota, dimana dengan table tersebut dapat diketahui jumlah Rumah Sakit dari setiap Kabupaten atau Kota dan jumlah keseluruhan Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah tabel jumlah Rumah Sakit di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.2
Jumlah Rumah Sakit Di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit
1	Kab. Bogor	9
2	Kab. Sukabumi	4
3	Kab. Cianjur	3
4	Kab. Bandung	10
5	Kab. Garut	2
6	Kab. Tasikmalaya	0
7	Kab. Ciamis	4
8	Kab. Kuningan	6
9	Kab. Cirebon	8
10	Kab. Majalengka	3
11	Kab. Sumedang	2
12	Kab. Indramayu	7
13	Kab. Subang	4
14	Kab. Purwakarta	4
15	Kab. Karawang	12
16	Kab. Bekasi	26
17	Kab. Bandung Barat	0
18	Kota Bogor	9
19	Kota Sukabumi	6
20	Kota Bandung	31
21	Kota Cirebon	10
22	Kota Bekasi	26
23	Kota Depok	13
24	Kota Cimahi	5
25	Kota Tasikmalaya	10
26	Kota Banjar	1
	Jumlah	**199**

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan 2011)

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah total Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu 199, dari 26 Kabupaten atau Kota 2 Kabupaten diantaranya tidak memiliki rumah sakit. Dua Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat.

Di bawah ini merupakan tabel daftar nama penyakit menular dan tidak menular yang ada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 penyakit menular

dan 6 penyakit tidak menular, dimana dengan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penyakit yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah tabel daftar jumlah nama penyakit menular dan tidak menular di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.3
Daftar Nama Penyakit Menular dan Tidak Menular di Provinsi Jawa Barat

Penyakit Menular	Penyakit Tidak Menular
Anthrax	Asma
Cacar air (Varicella)	Cidera Ginjal Akut
Chikungunya	Diabetes Melitus
Demam Berdarah Dengue	Hipertensi (Darah Tinggi)
Diare	Kanker Payudara
Filarasis	Kelainan PreKanker dan Kanker Kulit
Flu Babi (Swine Influence)	
Hepatitis akut	
Influenza	
Influenza Burung (Avian Influenza)	
Kusta	
Leptospirosis	
Malaria	
Pemeriksaan Laboratorium dan Interpretasinya	
Perawatan pasien Influenza A H1N1 baru H1N1 (Strain Mexico) di rumah atau bilamana terjadi wabah atau Pandemi	
Pneumonia	
Poliomyenitis	
Tuberkulosis	

(Sumber: Bagian Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011)

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah nama penyakit menular dan tidak menular yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu 25, yang terdiri dari dari 18 penyakit menular dan 6 penyakit tidak menular. Dilihat dari tabel di atas perbandingan antara penyakit menular dan tidak menular maka di Provinsi Jawa Barat lebih banyak penyakit menular dan hanya sedikit penyakit yang tidak menular.

3.2 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Sejarah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pada permulaan zaman kemerdekaan/revolusi (17-08-45) penyelenggaraan pemerintah di bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Jawatan/Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Purwosuwardjo sebagai Doakres di Bandung. Jawatan Kesehatan ini pertama kali berkantor di sebuah gedung di Jalan Diponegoro kemudian pindah ke Jalan Braga (sekarang dipakai Toko Sarinah) karena Belanda terus menerbu, maka Dokares Priangan bersama-sama dengan Kantor Keresidenan mengungsi ke Garut menempati Hotel Melati ini terjadi pada bulan April 1946.

Pada tangal 1 Agustus 1946 dibentuk Jawa Barat, nama Kantor Inspeksi Kesehatan Jawa Barat berulang kali berubah yaitu pada tahun 1953 menjadi Jawatan Kesehatan Inspeksi Jawa Barat, pada tahun 1957 Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1957 Kantor Inspeksi Kesehatan Jawa Barat dan pada tahun 1959 menjadi Dinas Kesehatan Dasawati I Jawa Barat. Perkembangan pengorganisasian bidang kesehatan di Jawa Barat sejak Pelita I mengalami perubahan. Mulai tahun 1970 unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan berbentuk Jawatan Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 189/OP/GOM/SK/70. Sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 125/IV/Kab./BU/75 diadakan pemisahan Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Jawa Barat dan dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kantor Wilayah Departemen Kesehatan (Kanwil Depkes) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Perencanaan, dan
3. Bidang Pelayanan dan Pengendalian.

Akan tetapi pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 275/Men.Kes./SK/VII/79 susunan organisasi Kanwil Depkes terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha,
2. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi,
3. Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
4. Bidang Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular, dan
5. Bidang Bimbingan dan Pengendalian Produksi dan Penggunaan Obat dan Makanan.

Pada tahun 1986 struktur organisasi dan tata kerja Kanwil Depkes Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan, semula terdiri dari kepala kantor wilayah yang membawahi 1 bagian dan 4 bidang menjadi 1 bagian dan 5 bidang. Ada era desentralisasi terjadi lagi perubahan struktur organisasi dan tata kerja, pada tahun 2001 terjadi penggabungan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan Kanwil Depkes Provinsi Jawa Barat menjadi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di Jalan Pasteur No. 25 Bandung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Mencakup gedung perkantoran di Jalan Pasteur No. 25 dan 4 (empat) UPTD, yaitu:

1. Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Masyarakat (BPTKM) Jalan Pasteur No. 31 Bandung,
2. Balai Penembangan Laboratorium Kesehatan (BPLK) Jalan Sederhana No. 3-5 Bandung, dan
3. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Jalan Rancaekek dan KP4 Jalan Satria No. 95 Cirebon.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat seluruhnya 360 orang.

3.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008, dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di bidang pembangunan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk instansi milik pemerintah daerah dan sebagai penunjang pembangunan kesehatan.

2. Peran

Peran Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan,
b. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan,
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan,
d. Penyelenggara tugas-tugas kesekretariatan,
e. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD, dan
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Deterapkannya yang mengatur tentang SOTK organisasi perangkat daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan walaupun belum lengkap dengan pengaturan UPTD. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di jalan Pasteur No. 25 Bandung, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran di jalan Pasteur

No. 25 Bandung dan 4 (empat) UPTD, yaitu:

1. Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Masyarakat (BPTKM) jalan Pasteur No. 31 Bandung,
2. Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan (BPLK) jalan Sederhana No. 3-5, dan
3. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) jalan Rancaekek dan KP4 jalan Satria No. 94 Cirebon.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat seluruhnya kurang/lebih 360 orang. Data terperinci adalah sebagai berikut:

a. Pejabat eselon II dan II (6 orang),
b. Subbag perencanaan dan pelaporan (14), subbag keuangan (49),
c. Subbag kepegawaian dan umum (91),
d. Seksi akreditasi sarana kesehatan (14),
e. Seksi akreditasi dan pendayagunaan tenaga (18),
f. Seksi ligislasi dan kebijakan kesehatan (19),
g. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus (18),
h. Seksi kesehatan keluarga dan gizi (15),
i. Seksi rumah sakit (16),
j. Seksi penyehatan lingkungan (16),
k. Seksi pengendalian penyakit (23),
l. Seksi pengamatan pencegahan penyakit matra (19),
m. Seksi farmasi, kosalkes dan mamin (15),
n. Seksi promise kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (16), dan

o. Seksi teknologi dan informasi kesehatan (14).

3.2.3 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, maka Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing, adapun Tujuan, Sasaran dan Kebijakan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Untuk mendorong tingkat pendidikan, kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat.
2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai illmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran:

"Meningkatkan askses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk

kesehatan ibu dan anak".

Strategi:

"Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas kebijakan, program dan sasaran".

Kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak,
2. Mengembangkan system kesehatan,
3. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, dan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Program:

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka disusun program-program pembangunan sesusi dengan kebijakan yang telah diuraikan di atas sengan sasaran program sebagai berikut:

Kebijakan 1:

Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program upaya kesehatan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan Desa Siaga dan berperilaku hidup bersih dan sehat,
    b. Meningkatnya keluarga sadar gizi,

c. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan masyarakat beresiko tinggi,
d. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu,
e. Meningkatnya penggunaan obat rasional dan pemakaian obat generic di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang,
f. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra,
g. Teratasinya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming, dan
h. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas dan olah raga yang baik, benar, teratur dan terukur.

Kebijakan 2:

Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program sistem kesehatan, dengan sasaran:
   a. Meningkatkan kualifikasi Rumah Sakit Provinsi Jawa menjadi *center of excellent/*rujukan spesifik berbasis masalah kesehatan Jawa Barat (stroke, jantung, gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia,
   b. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (laboratorium diagnostic kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung),
   c. Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di Provinsi dan

Kabupaten/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif),

d. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan skala provinsi,
e. Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan skala provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan,
f. Terwujudnya sistem informasi dan *surveillance* epidemiologi kesehatan yang *evidence* base, akurat di seluruh kabupaten/kota, provinsi dan online dengan nasional,
g. Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman public tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal,
h. Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu,
i. Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu, dan
j. Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
   a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit,
   b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana peleyanan

kesehatan di puskesmas dan jaringannya, dan

c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.

Kebijakan 3:

Menginkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya junlah/persentase desa mencapai Universal Child Immunization (UCI),
   b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penularan penyakit akibat pemanasan global (global warming),
   c. Meningkatkan upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria, penyakit Vaido Vascular (Stroke, MI), penyakit metabolism (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gigi dan mulut, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja,
   d. Setiap KLB dilaporkan secara tepat kurang dari 24 jam kepada kepala instansi kesehatan terdekat,
   e. Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat,
   f. Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada panguatan sistem, kepatuhan terhadap standard an peningkatan komitmen para pihak, dan
   g. Terdendalinya pencerminan lingkungan sesuai dengan standar kesehatan

terutama di daerah lintas batas kabupaten/kota dan provinsi.

Kebijakan 4:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program sumber daya kesehatan dengan sasaran:
    a. Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar,
    b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan,
    c. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan,
    d. Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9000,-/orang/tahun),
    e. Meningkatnya citra pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, dan
    f. Meningkatnya junlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar.

3.2.4 Program Kerja dan Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan kesehatan tahun 2008-2013 merupakan penajaman, peningkatan cakupan dan kealnjutan dari prioritas pembangunan kesehatan periode tahun 2005-2008. Prioritas pembangunan kesehatan tersebut dijabarkan setiap tahun dengan issu strategis tahun 2010 sebaga berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, masyarakat miskin, di daerah terpencil,

tertinggal, dan daerah perbatasan,

2. Intensitas dan penyebaran penyakit (multiple burden of disease), gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana, dan
3. Perilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas,
2. Meningkatnya sumber daya dan infrastruktur pelayanan kesehatan,
3. Meningkatnya pengendalian penyakit, gizi buruk, dan tertanganinya krisis kesehat akibat bencana,
4. Terwujudnya kemitraan strategis dalam penerapan sistem kesehatan provinsi, dan
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Kegiatan unggulan:

1. Peningkatan promosi PHBS dan pengembangan kabupaten/kota siaga menjadi kabupaten/kota sehat,
2. Peningkatan pelayanan imunisasi dasar, dan
3. Peningkatan penemuan kasus dan pengobatan TB.

3.2.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Surat Keputusan Menteri No. 32 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi, yang berlaku

sampai adanya Undang-undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kepala:
    1. Memimpin kantor,
    2. Mengkoordinasi seluruh pekerjaan,
    3. Membina seluruh karyawan dan karyawati, dan
    4. Membuat perencanaan dan anggaran sarana dan infrastruktur.

B. Sekretaris:
    1. Membantu pimpinan dalam bidang administrasi,
    2. Menyiapkan konsep-konsep keluar, dan
    3. Membantu menyiapkan perencanaan pengadaan sarana dan infrastruktur.
        a. Sub bagian perencanaan dan program:
            1. Membantu pimpinan menyiapkan rencana dan program,
            2. Mengkoordinasikan seluruh unit dalam menyiapkan rencana dan program, dan
            3. Mengevaluasi realisasi dari perencanaan dan program.
        b. Sub bagian keuangan: meyiapkan rencana anggaran organisasi.
        c. Sub bagian kepegawaian dan umum:
            1. Menyiapkan rencaan pengadaan SDM,
            2. Menyiapkan rencana penerimaan SDM, dan
            3. Menyiapkan pengembangan karir pegawai.

C. Bidang regulasi dan kebijakan kesehatan:
    1. Menyiapkan konsep kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang

kesehatan, dan

2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
    a. Seksi akreditasi sarana kesehatan:
        1. Menyiapkan perencanaan penilaian yang berkaitan dengan akreditasi, dan
        2. Mengevaluasi hasil-hasil akreditasi.
    b. Seksi akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan:
        1. Menyiapkan perencanaan penilaian yang berkaitan dengan akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan, dan
        2. Mengevaluasi hasil-hasil akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
    c. Seksi legislasi dan kebijakan kesehatan:
        1. Meniapkan perencanaan peraturan perundang-undangan, dan
        2. Mengevaluasi hasil-hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan.

D. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan:
    1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan
    2. Meyiapkan segala sarana dan prasarana SDM dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
        a. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus:
            1. Meniapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar dan khusus, dan

2. Mengevaluasi hasil-hasil dari pelayanan kesehatan dasar dan khusus.

b. Seksi kesehatan keluarga dan gizi:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kesehatan keluarga dan gizi, dan
2. Mengevaluasi hasil-hasil dari pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

c. Seksi rumah sakit:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan untuk semua pasien, dan
2. Meningkatkan pelayanan terhadap pasien.

E. Bidang bina pelayanan lingkungan dan pencegahan penyakit:

1. Menyiapkan rencana pembinaan pelestarian lingkungan dan pencegahan penyakit, dan
2. Mengevaluasi hasil-hasil perencanaan di bidang penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit.

a. Seksi penyehatan lingkungan:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan, dan
2. Mengevaluasi hasil-hasil dari pelayanan penyehatan lingkungan.

b. Seksi pengamatan, pencegahan penyakit dan matra:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengamatan, pencegahan penyakit dan matra,

2. Melakukan pengamatan, pencegahan penyakit dan matra, dan
3. Mengevaluasi hasil-hasil dari pengamatan, pencegahan penyakit dan matra.

F. Bidang sumber daya kesehatan:
   1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sumber daya kesehatan, dan
   2. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya kesehatan.
      a. Seksi farmasi, kosalkes dan mamin:
         1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan farmasi, kosalkes dan mamin, dan
         2. Mengevaluasi hasil-hasil dari pelayanan farmasi, kosalkes dan mamin.
      b. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat:
         1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan
         2. Mengevaluasi hasil-hasil dari promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
      c. Seksi teknologi dan informasi kesehatan:
         1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi dan informasi kesehatan, dan
         2. Mengevaluasi hasil-hasil dari teknologi dan informasi kesehatan.

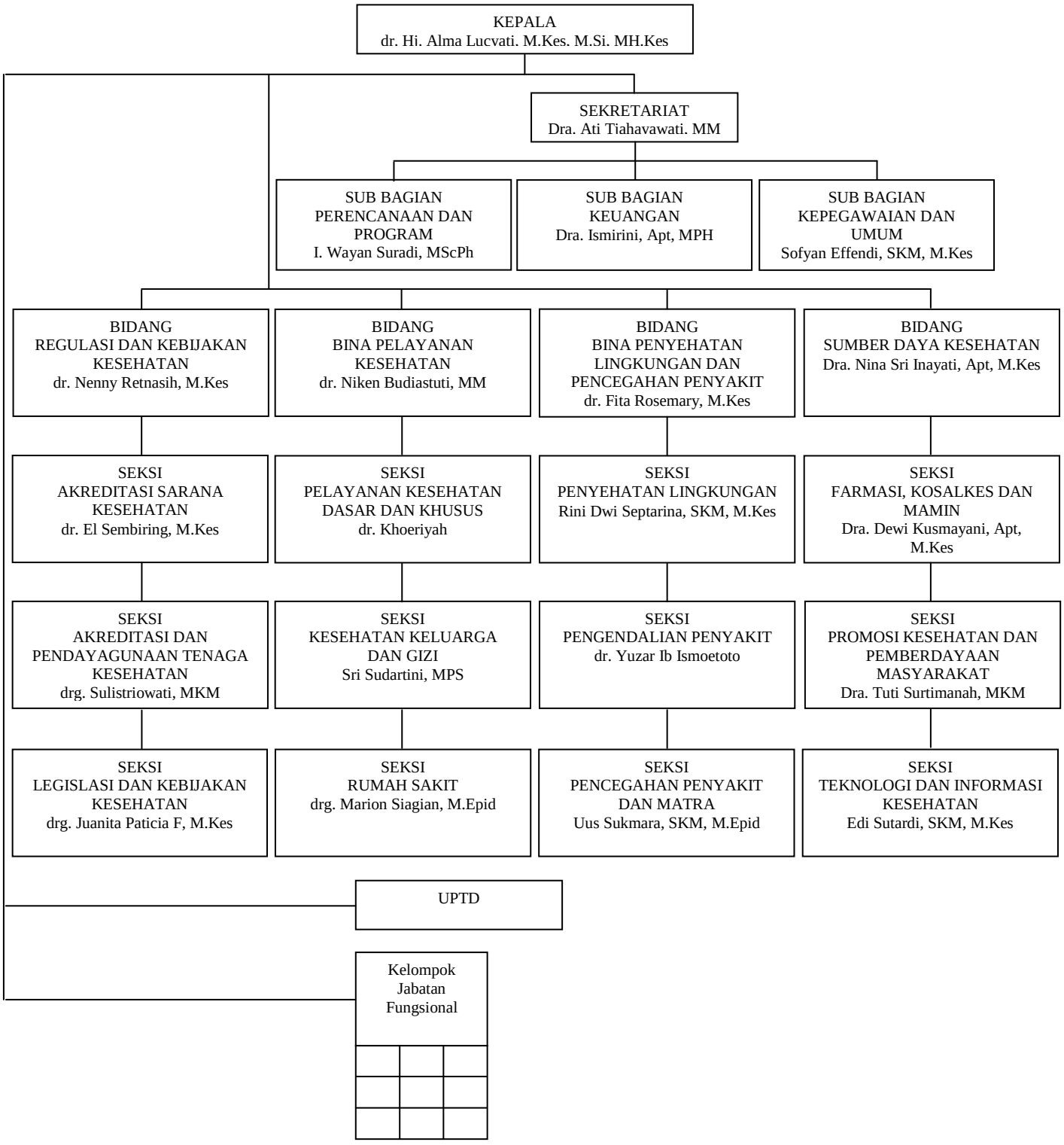
G. UPT (Unit Pelaksana Teknis): melakukan kegiatan operasional.

H. Kelompok JAFUNG (Jabatan Fungsional): berkaitan langsing dengan

keahlian. Contoh: dokter, perawat, bidan, dan lain-lain.

Di bawah ini merupakan bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:

Bagan 3.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



(Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011)

3.3 Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pembangunan upaya kesehatan masyarakat dilakukan di seluruh pelosok Jawa Barat, melalui keberadaan Rumah Sakit. Fungsi institusi kesehatan terdepan (Rumah Sakit) tidak sekedar sebagai pemberi pelayanan kesehatan saja, namun juga melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan masyarakat baik bersifat promotif, preventif, kuratif bahkan terkadang sampai rehabilitas. Disamping itu pembinaan terhadap sarana bik milik pemerintah maupun swasta dan penggerakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang berada di wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya.

Semua pelaksanaan kegiatan tersebut di atas perlu dicatat dan dilaporkan secara teratur, tepat waktu dan dengan pengisian data yang benar. Dalam era pembangunan ini keberadaan data dan informasi memegang peran yang sangat penting. Data yang benar-benar akurat, terpercaya, bersinambungan, tepat waktu dan mutakhir, sangat diperlukan dalam pengelolaan program, perencanaan, pemantauan pelaksanaan program dan proyek serta kegiatan yang akan dilakukan.

SIRS telah dikembangkan dengan tujuan agar mampu memberikan data dan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan untuk proses pengambilan kebutusan di berbagai tingkat administrasi. Selain itu dapat juga digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau mengetahui permasalahan yang terdapat di suatu rumah sakit.

Pengumpulan data dan informasi dari rumah sakit tersebut dilaksanakan berdasarkan periode yang telah ditentukan yang berisi data dan informasi dari

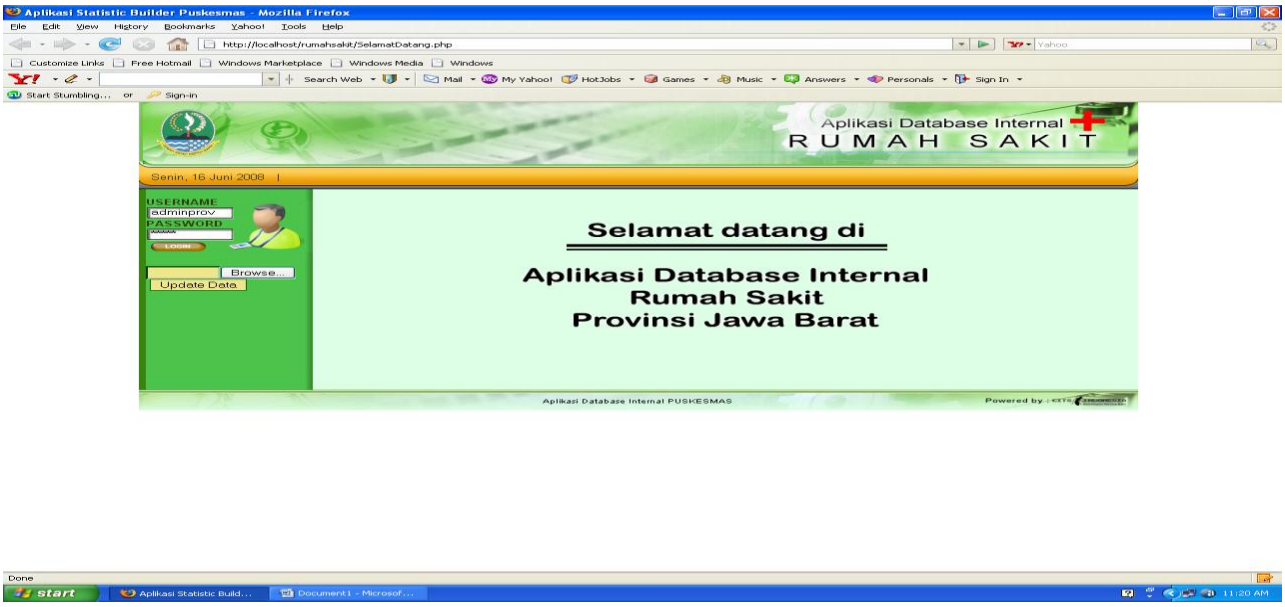
rumah sakit melalui laporan tentang kegiatan pelayanan, morbiditas/mortalitas, ketenagaan, inventarisasi dan peralatan kesehatan rumah sakit.

Sistem Pelaporan Rumah Sakit yang telah berganti nama menjadi Sistem Informasi Rumah Sakit ini memberi beberapa kemudahan dalam memberikan data dan informasi dari seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mencakup rumah sakit baik yang dikelola oleh pemerintah dan rumah sakit yang dikelola oleh sektor swasta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

SIRS sebagai sistem informasi kesehatan telah diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan agar mampu memberikan data dan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan untuk proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat administrasi. Dalam penggunaanya hanya untuk aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan, karena SIRS tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat. Aplikasi SIRS ini hanya digunakan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saja, karena aplikasi ini bersifat internal, yang menghubungkan antar pemerintah (*G2G*-hubungan inter-agency). Sedangkan apabila ada masyarakat yang ingin memperoleh informasi kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat harus datang de Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Gambar 3.1 di bawah ini menunjukan tampilan home data base SIMRS di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Sebagai langkah untuk pengaksesan, disarankan menggunakan Mozilla Firefox dan halaman yang pertama kali muncul adalah halaman Login, untuk keperluan otentifikasi *user*.

Gambar 3.1
Tampilan Home Data Base Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

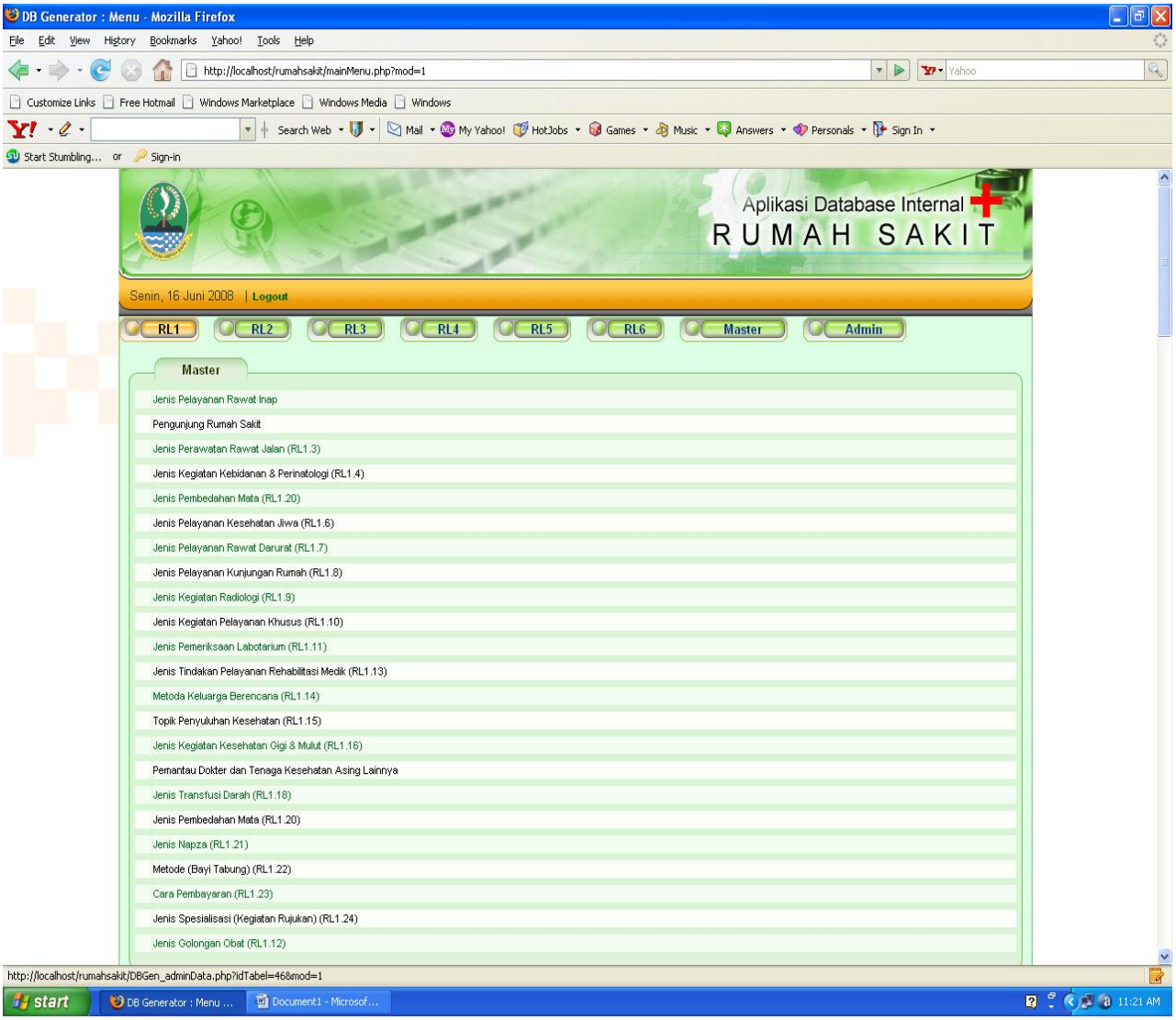


(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Gambar 3.1 di atas merupakan gambar tampilan home data base SIRS di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang di sebelah kiri terdapat *username* dan *password*. Pengelola atau pengguna yang akan menggunakan kemudian diminta untuk memasukan *username* dan *password. Username* dan *password* hanya dapat digunakan oleh pengelola atau pengguna yang akan menggunakan SIRS. Pengelola atau pengguna di sini yaitu aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena SIRS tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat. Aplikasi SIRS ini hanya digunakan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saja, karena aplikasi ini bersifaf *Government to Government.* Setelah itu pengelola atau pengguna yang akan menggunakan kemudian mengklik tombol *login* yang kemudian akan muncul tampilan informasi mengenai kesehatan seperti data kegiatan rumah sakit, data kegiatan morabilitas pasien rawat inap, data dasar

rumah sakit dan lain-lain dapat kita lihat dari menu RL1, RL2, RL3, RL4, RL5 dan RL6, yang dapat kita lihat pada gambar 3.2 di bawah ini:

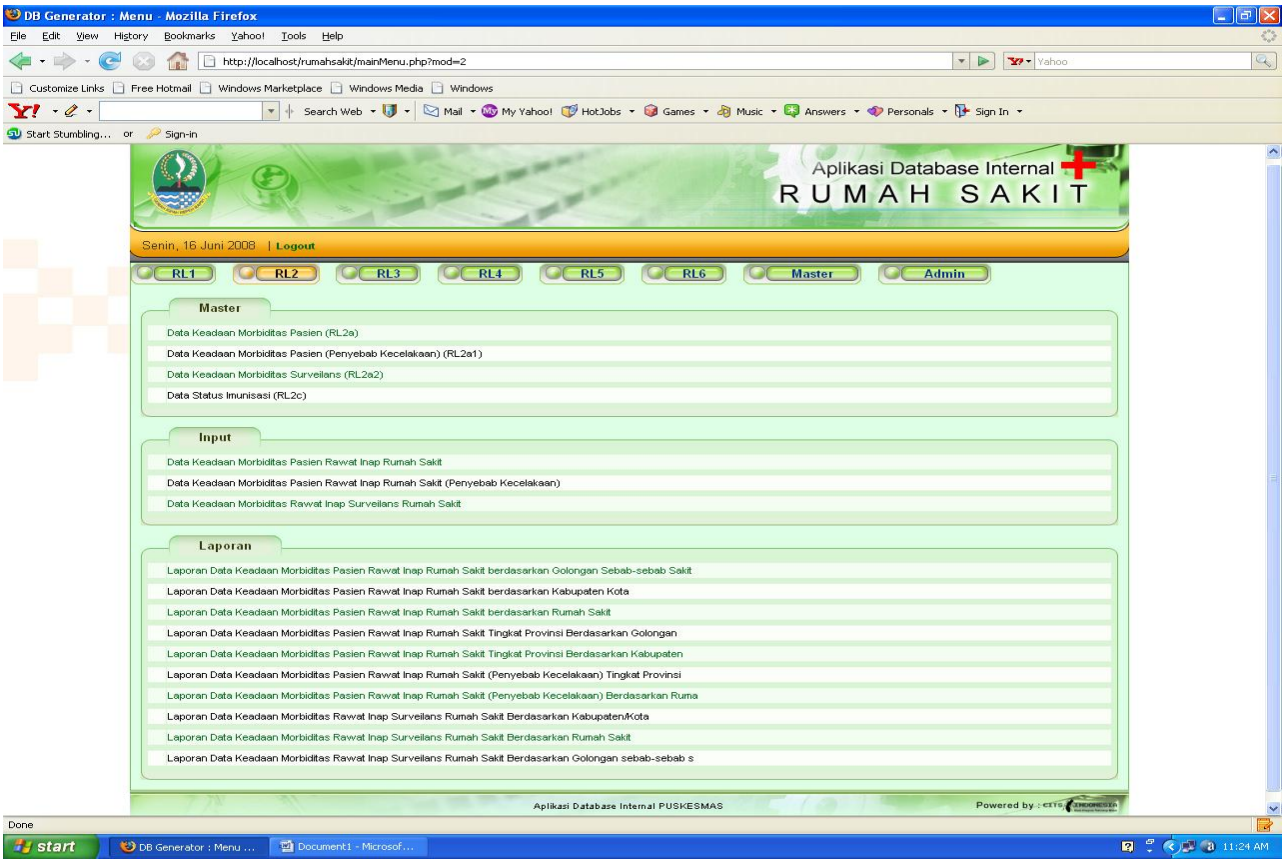
Gambar 3.2
Tampilan Data Kegiatan Rumah Sakit (RL1)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.2 di atas menginformasikan mengenai formulir rekapitulasi yang mencakup berbagai kegiatan rumah sakit seperti rawat inap, rawat jalan, pelayanan intalasi gawat darurat, kegiatan bedah dan non bedah, pelayanan kesehatan gigi, kegiatan radiologi, pengujian kesehatan, rujukan, rehabilitasi medik, latihan kerja, keluarga berencana, immunisasi, pelayanan kesehatan jiwa, kegiatan pembedahan mata, kegiatan napza dan sebagainya.

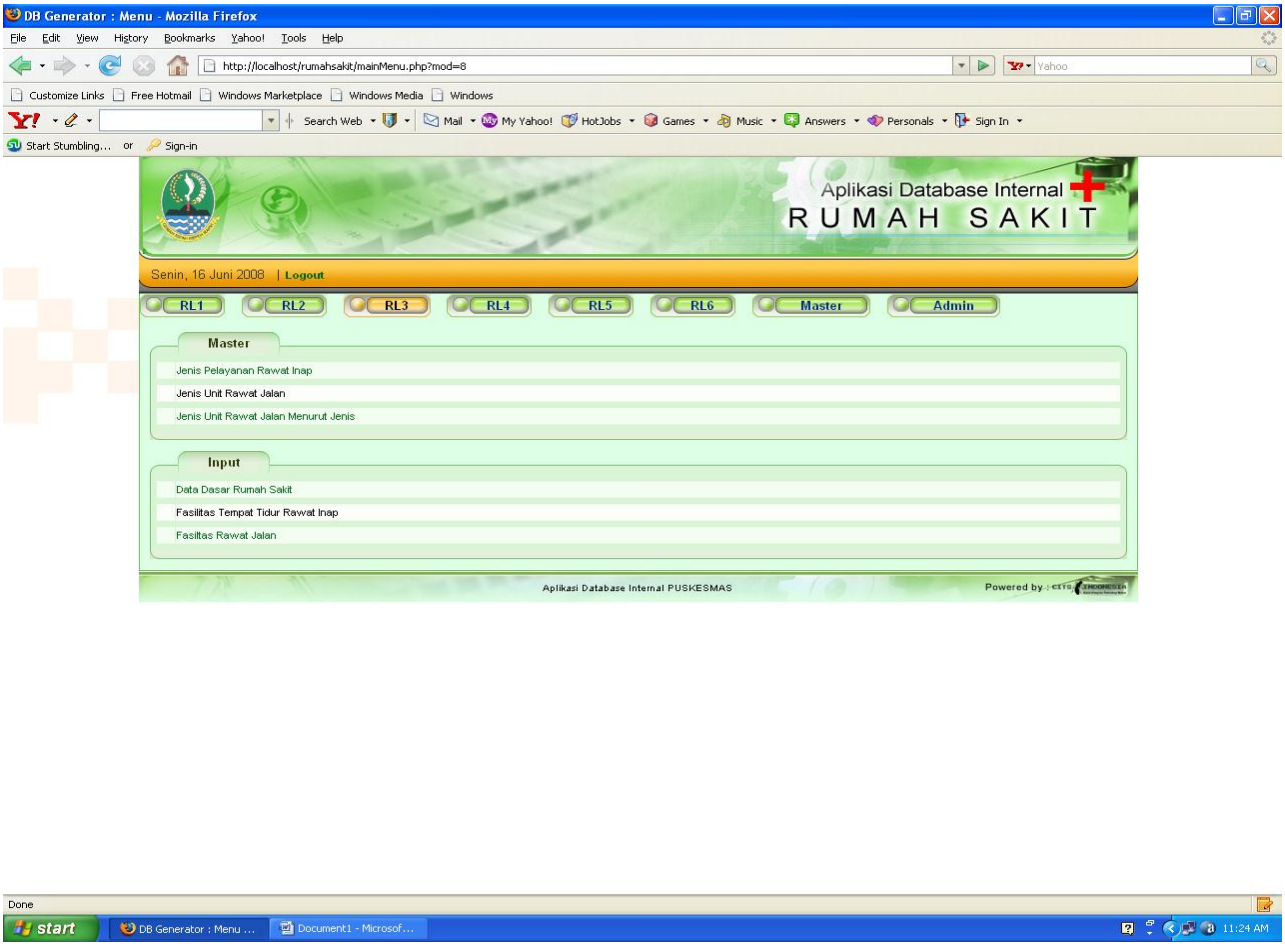
Gambar 3.3
Tampilan Keadaan Morabiditas Pasien Rawat Inap (RL2a)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.3 di atas menginformasikan mengenai data kompilasi penyakit/morabilitas pasien rawat inap yang dikelompokan menurut daftar tabulasi dasar KIP/10. Untuk masing-masing kelompok penyakit dilaporkan mengenai jumlah pasien ke luar menurut golongan umur dan menurut jenis kelamin, serta jumlah pasien mati untuk masing-masing penyakit.

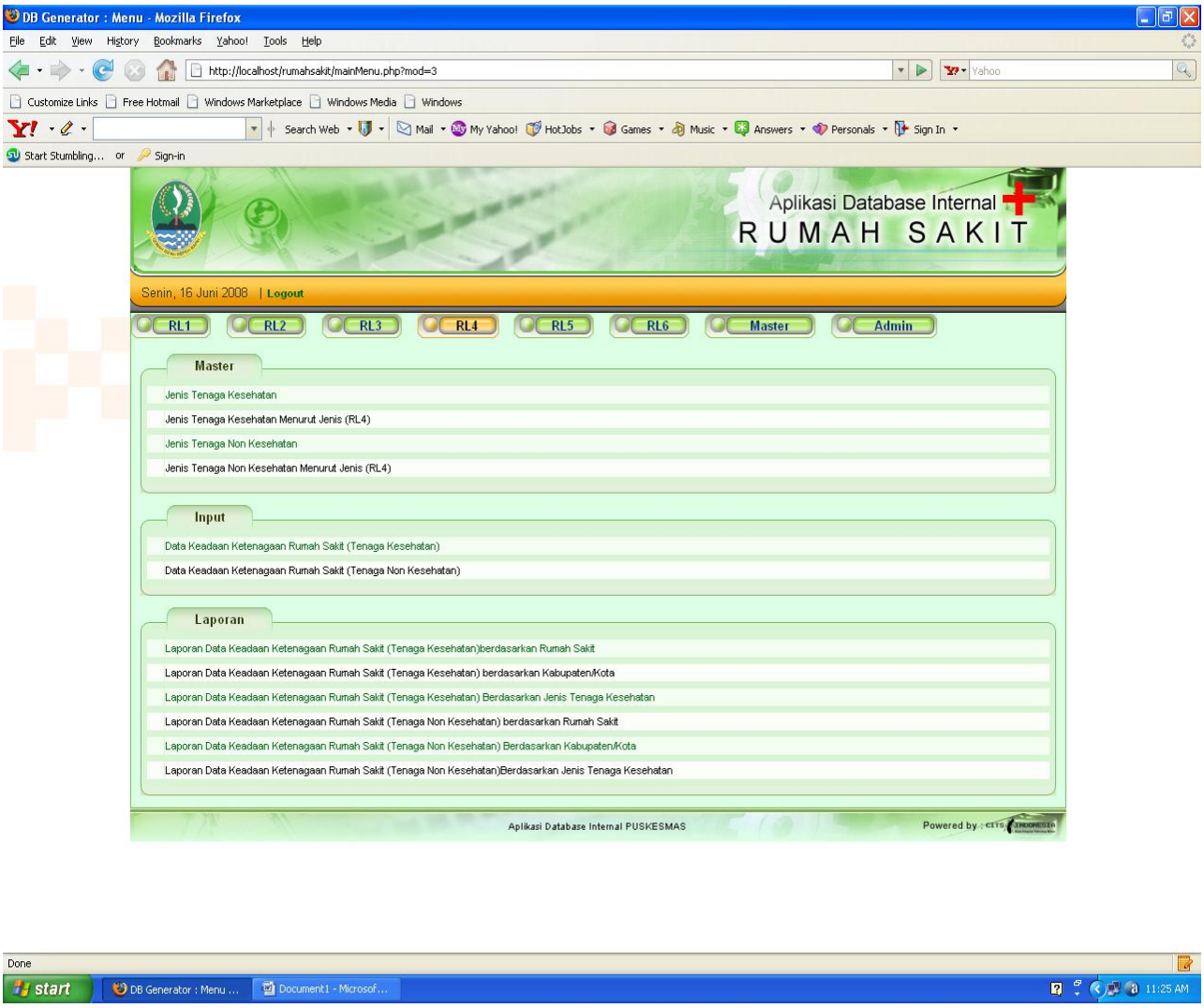
Gambar 3.4
Tampilan Data Dasar Rumah Sakit (RL3)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.4 di atas menginformasikan mengenai data identitas rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, kelas rumah sakit, surat izin, kepemilikan, direktur rumah sakit, fasilitas tempat tidur, fasilitas rawat jalan.

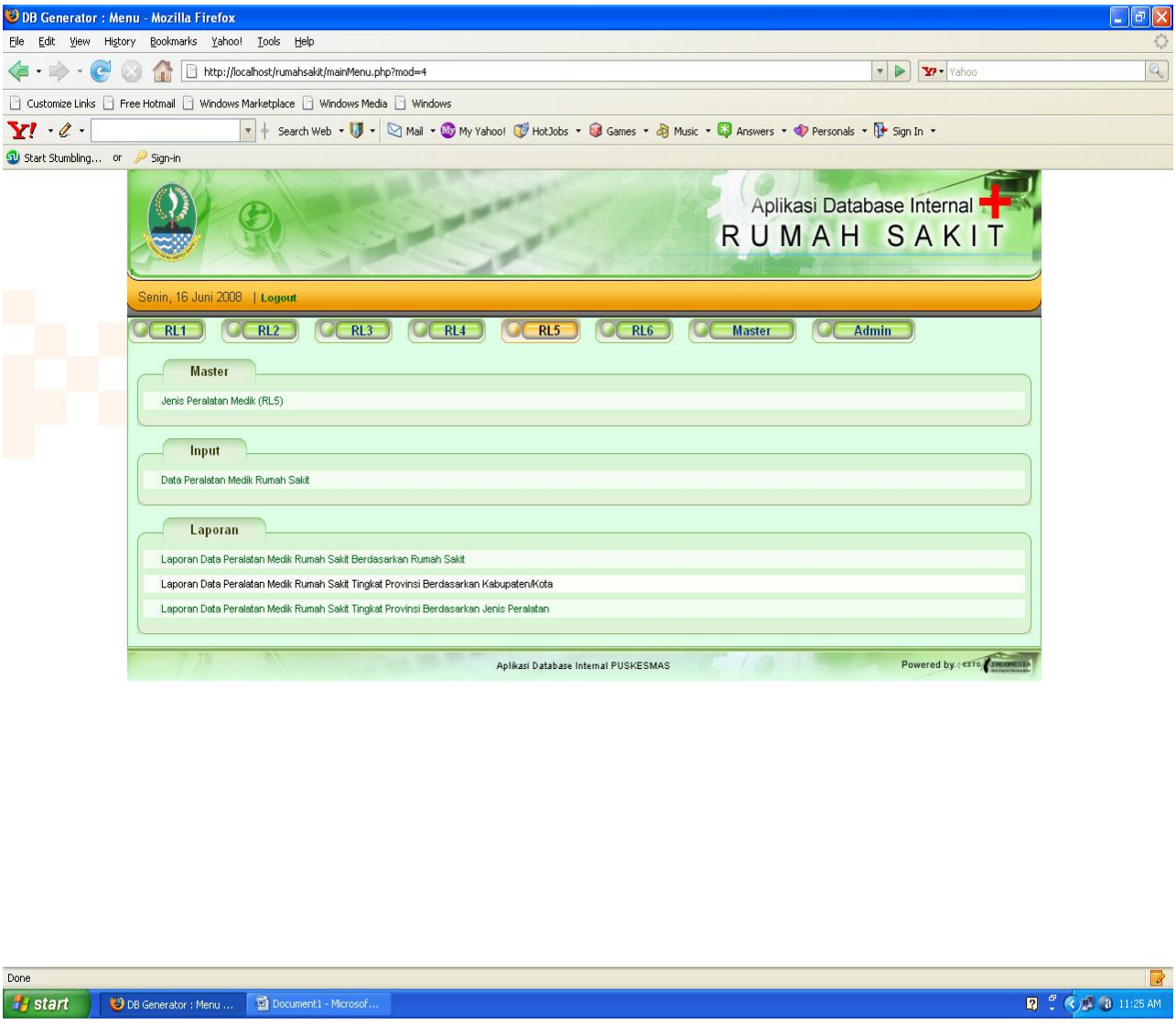
Gambar 3.5
Tampilan Data Peralatan Medik Rumah Sakit (RL4)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.5 di atas menginformasikan mengenai data jumlah tenaga yang bekerja di rumah sakit menurut kualifikasi pendidikan dan status kepegawaian.

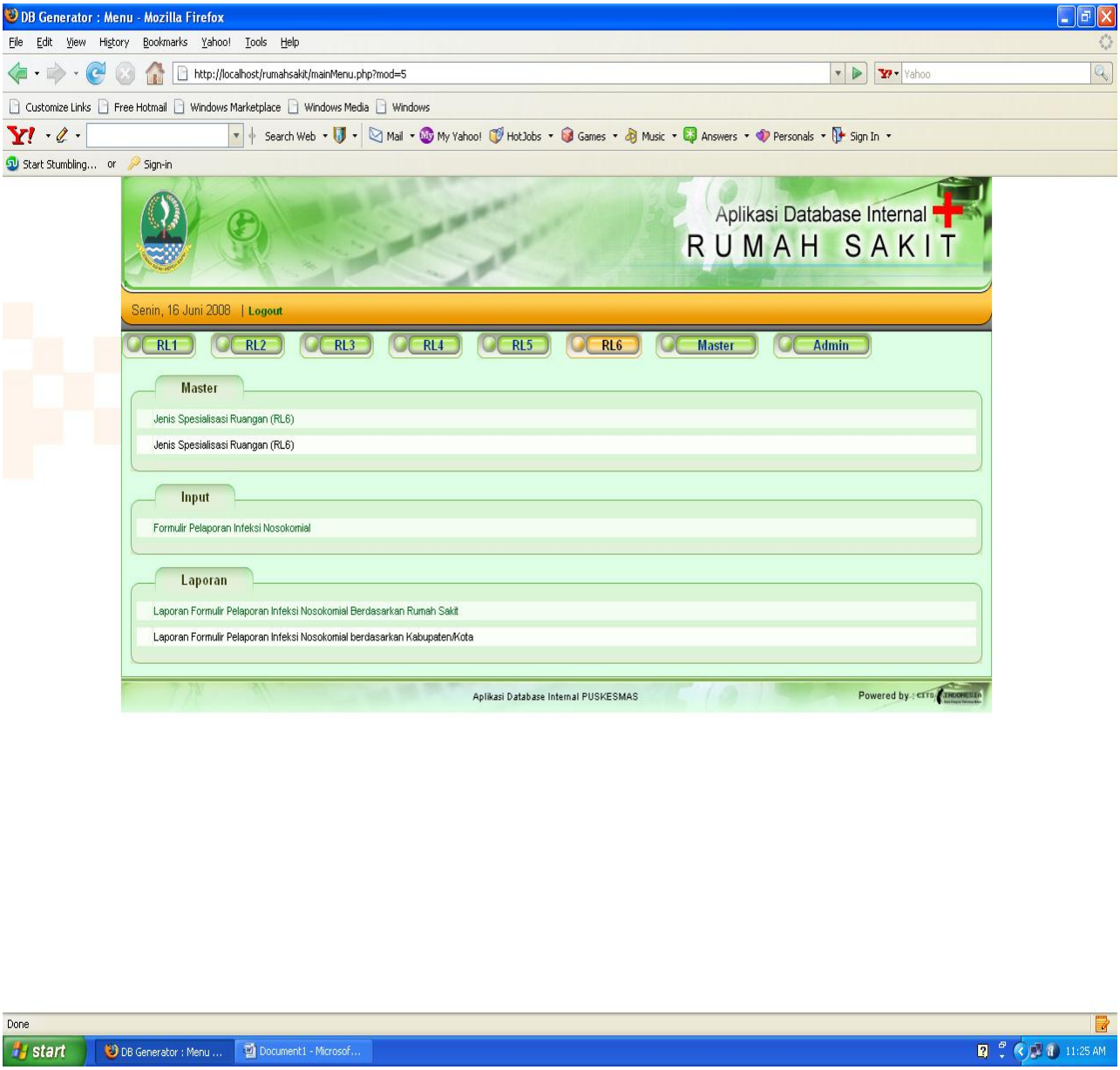
Gambar 3.6
Tampilan Data Peralatan Medik Rumah Sakit dan Data Kegiatan Kesehatan Lingkungan (RL5)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.6 di atas menginformasikan mengenai data jumlah dan jenis peralatan medik, jumlah umur, kondisi izin operasional, sertifikat kalibrasi serta data kesehatan lingkungan rumah sakit.

Gambar 3.7
Tampilan Data Infeksi Nosokomial Rumah Sakit (RL6)



(Sumber: SIRS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2011)

Data base yang terlihat pada gambar 3.7 di atas menginformasikan mengenai data infeksi nosokomial, yaitu merupakan formulir rekapitulasi infeksi nosokomial di rumah sakit yang terbagi dua.